



Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Sukamulya

**Ani Rosidah¹, Septian Triana², Siti Nuryanti Dewi Patimah³, Riharti Roro Novariyanti⁴,
Fajar Rekso⁵**

¹ *Instansi Universitas Majalengka, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia*

² *Informatika FT, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia*

³ *Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia*

⁴ *Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia*

⁵ *Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia*

**Email: anirosidah@unma.ac.id*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam memperoleh NIB. Program ini dilaksanakan di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka melalui metode observasi, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai manfaat NIB sebagai identitas legal usaha yang dapat mempermudah akses terhadap program pemerintah, pembiayaan usaha, dan peluang pengembangan usaha. Pendampingan secara langsung membantu peserta memahami prosedur pendaftaran serta melengkapi dokumen yang diperlukan. Sebagai hasilnya, program ini berhasil memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi tujuh pelaku UMKM di Desa Sukamulya. Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat memperkuat kapasitas UMKM melalui peningkatan legalitas usaha.

Kata Kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha, Pemberdayaan Masyarakat, OSS.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an essential role in supporting local economic growth. However, many MSME actors still lack business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) due to limited information and understanding of the Online Single Submission (OSS) registration process. This community service activity aimed to improve MSME understanding regarding the importance of business legality and provide assistance in obtaining NIBs. The program was conducted in Sukamulya Village, Kertajati District, Majalengka Regency through observation, socialization, mentoring, and evaluation methods. The target participants were MSME owners who had not yet obtained business legality. The results indicated an increase in

participants' understanding of the benefits of NIB as a legal business identity, which facilitates access to government programs, business financing, and business development opportunities. Direct mentoring assisted participants in understanding the registration procedures and completing the required documents. As a result, the program successfully facilitated the issuance of Business Identification Numbers (NIBs) for seven MSME owners in Sukamulya Village. This program demonstrates that collaboration among universities, village governments, and communities can strengthen MSME capacity through improved business legality.

Keywords: MSMEs, Business Identification Number, Business Legality, Community Empowerment, OSS.

PENDAHULUAN

Legalitas usaha merupakan faktor penting dalam mendukung pengembangan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti program pemberdayaan dari pemerintah. Selain itu, pendampingan berbasis Online Single Submission (OSS) terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Keberadaan UMKM memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kepemilikan NIB menjadi salah satu syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, kemudahan perizinan, serta berbagai program pemberdayaan usaha dari pemerintah. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM di tingkat desa yang belum memiliki NIB karena kurangnya informasi mengenai manfaat legalitas usaha, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan kemampuan dalam mengakses sistem OSS.

Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka memiliki berbagai usaha mikro yang berkembang berdasarkan potensi lokal masyarakat. Beberapa jenis usaha yang aktif dijalankan meliputi budidaya jamur, budidaya semangka, produksi jamu tradisional, usaha rampeyek, depot air galon, serta produksi ragi. Keberagaman jenis usaha tersebut menunjukkan potensi ekonomi masyarakat yang cukup baik. Namun berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian pelaku UMKM masih belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga berpotensi membatasi akses terhadap program bantuan pemerintah, pembiayaan usaha, maupun peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Winarto (2024) menyatakan bahwa pendampingan kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan usaha dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, Mulyadi et al. (2023) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan memberikan dampak positif terhadap kesiapan usaha dalam menghadapi persaingan. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang berfokus pada peningkatan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta memberikan pendampingan

dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Artikel ini merupakan hasil hilirisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara langsung bersama pelaku UMKM Desa Sukamulya dalam rangka meningkatkan legalitas usaha sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka pada tanggal 13 Juli sampai 12 Agustus 2026. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1. Observasi dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi UMKM serta mengetahui jumlah pelaku usaha yang belum memiliki NIB.

2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat NIB, serta prosedur pendaftaran melalui sistem OSS.



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Sosialisasi NIB kepada Pelaku UMKM Desa Sukamulya

3. Pendampingan Pembuatan NIB

Pelaku UMKM diberikan pendampingan secara langsung mulai dari persiapan dokumen, pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB kepada Pelaku UMKM Desa Sukamulya

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara singkat guna mengetahui tingkat pemahaman peserta serta keberhasilan pelaksanaan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan legalitas usaha pelaku UMKM di Desa Sukamulya. Kegiatan diawali dengan identifikasi pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha, dilanjutkan dengan sosialisasi manfaat NIB, pendampingan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta verifikasi data usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha untuk mendukung pengembangan usaha. Selain itu, program ini berhasil memfasilitasi penerbitan dan penyerahan NIB kepada tujuh pelaku UMKM di Desa Sukamulya.

Tabel 1. Pelaku UMKM yang Berhasil Mendapatkan NIB

No	Jenis UMKM	Status
1	Budidaya Jamur	NIB Terbit
2	Budidaya Semangka	NIB Terbit
3	Produksi Jamu Tradisional	NIB Terbit
4	Usaha Rampeyek 1	NIB Terbit
5	Usaha Rampeyek 2	NIB Terbit
6	Depot Air Galon	NIB Terbit
7	Produksi Ragi	NIB Terbit

Pendampingan dilakukan mulai dari pengumpulan dokumen persyaratan, pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB. Setelah seluruh tahapan selesai, dokumen NIB diserahkan langsung kepada masing-masing pelaku UMKM sebagai bentuk legalitas usaha yang sah.



Gambar 3. Penyerahan NIB kepada Pelaku UMKM Desa Sukamulya

Pembahasan

Penerbitan NIB kepada tujuh pelaku UMKM menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan mampu membantu masyarakat mengatasi hambatan administratif dan teknis dalam proses legalisasi usaha. Legalitas usaha memberikan manfaat berupa kepastian hukum, kemudahan dalam mengikuti program bantuan pemerintah, akses terhadap pembiayaan usaha, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian Nugraha dan Fauzi (2023) yang menyatakan bahwa pendampingan pembuatan NIB mampu meningkatkan akses legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro di pedesaan. Selain itu, Prasetyo dan Lestari (2022) menjelaskan bahwa legalitas usaha memiliki peran penting terhadap keberlanjutan dan perkembangan UMKM karena memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

Keberhasilan program didukung oleh antusiasme pelaku UMKM, dukungan Pemerintah Desa Sukamulya, serta pendampingan intensif yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-T Universitas Majalengka. Dari sisi sosial, kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. Dari sisi ekonomi, kepemilikan NIB membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan formal, pelatihan usaha, dan program pengembangan UMKM lainnya. Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha masih memerlukan pendampingan lanjutan terkait pemanfaatan legalitas usaha untuk memperoleh sertifikasi usaha lainnya, akses permodalan, pemasaran digital, dan pengembangan kapasitas usaha. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat yang diperoleh masyarakat dapat semakin optimal.

SIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Sukamulya berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Program ini juga berhasil memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi tujuh pelaku UMKM sebagai bentuk legalitas usaha yang sah.

Keberhasilan kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan langsung mampu membantu masyarakat mengatasi kendala administratif dan teknis dalam proses legalisasi usaha. Kolaborasi antara

perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat terbukti mampu memperkuat kapasitas UMKM melalui peningkatan legalitas usaha. Ke depan, diperlukan program pendampingan lanjutan terkait pengembangan usaha, sertifikasi usaha, pemasaran digital, dan akses permodalan agar keberlanjutan pengembangan UMKM dapat terus terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, LPPM Universitas Majalengka, pelaku UMKM Desa Sukamulya, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahra, N. (2023). Peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–8.
- Kusumawati, A., et al. (2024). Pelatihan digital marketing sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 1–8.
- Mulyadi, T., Wahab, A., Lubis, R., Asir, M., & Hanafiah, H. (2023). Pemberdayaan UMKM lokal melalui pelatihan digital marketing dan e-commerce. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 1–8.
- Winarto, W. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan digital marketing untuk meningkatkan kemampuan pemasaran produk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1–8.
- Putri, R., & Nugroho, A. (2022). Legalitas usaha sebagai faktor pendukung pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45–56.
- Wahyuni, S., & Kurniawan, D. (2023). Pendampingan perizinan usaha berbasis Online Single Submission bagi pelaku usaha mikro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 88–96.
- Setiawan, A., Pratama, Y., & Nuraini, F. (2022). Strategi pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha lokal. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(3), 112–121.
- Hidayat, R., & Sari, P. (2023). Transformasi digital UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 7(2), 67–76.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024). Panduan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Rahman, M., & Dewi, T. (2022). Peningkatan kapasitas usaha mikro melalui legalitas usaha dan akses pembiayaan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 4(1), 29–39.
- Siregar, A., & Handayani, N. (2023). Efektivitas program pendampingan UMKM dalam meningkatkan kemandirian usaha. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 8(2), 120–129.
- Prasetyo, E., & Lestari, D. (2022). Peran legalitas usaha terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(1), 53–62.
- Fitriani, N., & Yusuf, M. (2024). Implementasi sistem OSS dalam mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 14–23.
- Nugraha, A., & Fauzi, R. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha mikro di pedesaan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 6(2), 77–85.
- Sari, D., & Utami, L. (2022). Penguatan kapasitas UMKM melalui edukasi, pendampingan, dan legalitas usaha. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 90–101.